

**PERAN GURU
DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LULUSAN
DI SMA LB NEGERI CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

IAIN PURWOKERTO

Oleh
ANISA NUR ISNAENI
NIM. 1522104007

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Kajian Teoritik	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II Kerangka Teori	
A. Peran	19
1. Pengertian Peran	19
2. Dimensi Peran	21
3. Struktur Peran	22
4. Jenis Peran	23
5. Fungsi Peran	23
6. Pengertian Membangun Kemandirian	24
7. Pentingnya Membangun Kemandirian	26
8. Upaya Membangun Kemandirian	27

9. Peran Guru	30
10. Pengertian Disabilitas	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Peningkatan Peran SMA LB N Cilacap Dalam Meningkatkan Kemandirian Lulusan	53
C. Bentuk Peran Guru SMA LB N Cilacap Dalam Membangun Kemandirian Lulusan	54
D. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Data Lulusan Di SMA LB N Cilacap Tahun 2017/2018	53
----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
------------	-------------------

- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Foto
- Lampiran 4 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Blangko Keterangan Bimbingan
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

PERAN GURU DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN LULUSAN DI SMA LB N CILACAP

ANISA NUR ISNAENI
NIM 1522104007

ABSTRAK

Permasalahan penyandang *disabilitas*, semakin kompleks menuntut adanya intervensi atau penanganan dari berbagai pihak seperti keluarga, instansi pendidikan, pekerja sosial, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha karena berbagai pengaruh yang kemungkinan dapat terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu yang memiliki peran penting atau tanggung jawab dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas adalah instansi pendidikan atau dalam hal ini adalah sekolah. Oleh karena itu dalam menangani masalah disabilitas, sekolah memiliki prinsip-prinsip dan peranan yang strategis melalui intervensi instansi pendidikan baik secara mikro, meso, maupun makro yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pelayanan yang terkoordinir, bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang *disabilitas* tubuh, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran guru dalam membangun kemandirian lulusan. Subyek dalam penelitian ini adalah Guru Pendidik. Motode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara.

Penelitian ini menemukan bahwa peran guru dalam meningkatkan kemandirian lulusan di SMA LB N Cilacap belum nampak menunjukkan keberhasilan dalam membangun kemandirian lulusan. Dalam hal ini, meskipun kepala sekolah telah memberikan kebijakan yang sekiranya mampu membuat siswa lebih mandiri maupun pengajaran yang telah

diberikan oleh guru pendidik tetap saja hasil dari tujuan yang ingin dicapai masih belum nampak pencapaian yang diharapkan. Hal itu nampaknya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada dan kepala sekolah yang sering berganti sehingga kebijakan-kebijakan yang diberikan pun akan berbeda sehingga membuat pencapaian satu kebijakan belum terselesaikan sudah harus tergantikan dengan kebijakan yang baru.

Kata kunci: *Peran, Kemandirian, Guru, Siswa dan Lulusan.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, kesempatan dan memperoleh manfaat yang sama baik itu pendidikan maupun kesempatan kerja tanpa ada yang dibeda-bedakan. Pengakuan tersebut dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU tentang Penyandang Cacat), yang kemudian dikeluarkan pula Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (PP tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat). Dalam kedua peraturan tersebut yang berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang cacat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹

Menghormati hak asasi manusia tersebut adalah suatu kewajiban seperti yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk

¹Nita Ariyulinda. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, *Jurnal Hukum Negara*. Volume: 5 , No.1. (Perancang Muda Bagian Kesra Deputi Perundang-Undangan Setjen Dprri.2014. Hlm. 92. Diambil Dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/215> Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2019. Jam. 19:34 Wib.)

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap manusia tetap mempunyai hak asasi manusia tanpa terkecuali. Jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan bahkan jenjang pendidikan harus tidak membedakan hak asasi manusianya.²

Berkaitan dengan hal itu, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang juga berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan.

Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 UUD 1999 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”³

²Masyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 1993), Hlm. 47.

³Nurjalal, Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham. *Jurnal Pahlawan Volume 1 No 1 Issn : 2615-5583 (Online)*. (Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2018). Hlm. 33-34. Diambil Dari <https://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Pahlawan/Article/View/40>. Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2019. Jam 20:04.

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi tubuhnya.

Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 61 yang sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ هَيَّءَ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya[1051] atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi

Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.”(QS. An-Nur: 61).

Manusia yang memiliki kecacatan fisik atau mental terkadang membuat dirinya merasa tidak percaya diri dalam melakukan semua kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Dapat dikatakan sebagai penyandang *disabilitas*. Karena manusia mengenal dirinya pada mulanya dari dimensi biologisnya dan dia memanfaatkan anggota badannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, bekerja, dan berbagai aktivitas manusia. Tidak ada aktivitas kemanusiaan yang tidak melibatkan dimensi biologis ini. Karena itu badan dengan segenap unsurnya sangat penting bagi kehidupan ini.⁴ Namun kecacatan tersebut seharusnya tidaklah menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya.

Data PBB mengungkapkan 10 % dari total populasi penduduk dunia atau sekitar 650 juta adalah penyandang disabilitas. Laporan yang disampaikan Bank Dunia mengungkapkan sekitar 20 % dari penyandang *disabilitas* tubuh diseluruh dunia datang dari kelas ekonomi lemah. Kondisi sosial penyandang *disabilitas* tubuh pada umumnya dalam keadaan rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan. Secara ekstrem bahkan masih ada keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga yang disabilitas terutama di pedesaan.⁵

⁴Moeljono Notoedirdjo & Latipun, *Kesehatan Mental Konsep & Penerapan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 69.

⁵Sumber Data Diperoleh Dari Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan Situasi Penyandang Disabilitas, Kementrian Kesehatan RI. Diterbitkan oleh Infodatin Tahun 2014, hlm. 1.

Sedangkan jumlah penyandang disabilitas menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 adalah sebesar 2,45% (6.515.500 jiwa) dari 244.919.000 estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2012. Sementara menurut Program Perlindungan dan Layanan Sosial (PPLS) tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas secara nasional adalah sebanyak 3.838.985 jiwa. Perbedaan jumlah ini disebabkan oleh definisi operasional atau instrumen yang digunakan dalam survei berbeda.⁶

Dari data tersebut maka timbulah permasalahan disabilitas yang ditinjau dari sisi internal dan eksternal sebagaimana berikut:

1. Permasalahan Internal

- a. Gangguan atau kerusakan organ dan fungsi fisik dan atau mental sebagai akibat kelainan dan kerusakan organ menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas.
- b. Gangguan, hambatan atau kesulitan dalam orientasi, mobilitas, komunikasi, aktivitas, penyesuaian diri, penyesuaian sosial, kepercayaan diri, gangguan belajar, keterampilan, pekerjaan.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas.
- b. Stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan.
- c. Kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas dan penanganannya.

⁶Sumber Data Diperoleh Dari Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan Situasi Penyandang Disabilitas, Kementrian Kesehatan RI. Diterbitkan oleh Infodatin Tahun 2014, hlm. 1.

- d. Kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- e. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah.
- f. Masih banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi bila memiliki anggota keluarga disabilitas.
- g. Peran dunia usaha belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu adanya peran yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah atau instansi pendidikan untuk mengatasi masalah disabilitas. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjalannya suatu hal atau peristiwa.⁷

Pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara khususnya Indonesia oleh karena itu semua warga negara di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dan bermutu guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pendidikan berhak diberikan untuk semua peserta didik khususnya bagi para peserta didik penyandang disabilitas.⁸

Penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸Siti Annisa Rahmayani, *Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh. Skripsi.* (Yogyakarta: Prodi Pai Fak. Iai Uin Yogyakarta 2017-2018), Hlm.1 Diambil Dari [Http//Dspace.Uii.Ac.Id/Pdf](http://Dspace.Uii.Ac.Id/Pdf), Diakses Pada Tanggal 08 Juli 2019. Pukul 21.04.

disabilitas pasal 10 “Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dan d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Seperti halnya yang telah disebutkan juga dalam UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi bahwa diantara warga Indonesia tidak seorang pun yang tidak berhak memperoleh pengajaran termasuk didalamnya mereka yang tergolong anak-anak cacat. Dalam pasal 5 UU RI No.4 Tahun 1997 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁹

Permasalahan penyandang *disabilitas*, semakin kompleks menuntut adanya intervensi atau penanganan dari berbagai pihak seperti keluarga, instansi pendidikan, pekerja sosial, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha karena berbagai pengaruh yang kemungkinan dapat terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu yang memiliki peran penting atau tanggung jawab dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas adalah instansi pendidikan

⁹Eta Yuni Lestari¹, Slamet Sumarto² Dan Noorochmat Isdaryanto³. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Integralistik No.1/Th. Xxviii/2017, Januari-Juni 2017*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017). Hlm. 4. Diambil Dari [Http//Journal.Unnes.Ac.Id](http://Journal.Unnes.Ac.Id). Diakses Tanggal 09 Agustus 2019. Jam 20:40.

atau dalam hal ini adalah sekolah. Oleh karena itu dalam menangani masalah disabilitas, sekolah memiliki prinsip-prinsip dan peranan yang strategis melalui intervensi instansi pendidikan baik secara mikro, meso, maupun makro yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pelayanan yang terkoordinir, bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang *disabilitas* tubuh, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.

Ada beberapa program andalan SMA LB Negeri Cilacap yang sesuai dengan pasal 130 ayat 1 PP No. 17 Tahun 2010 yang menuntut agar alumni SMA LB dibekali keterampilan vokasional bukan ilmu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam hal ini SMA LB N Cilacap menyusun program pendidikan keterampilan vokasional kewirausahaan untuk menyiapkan siswanya menjadi tenaga kerja atau pelaku wira usaha disesuaikan dengan karakteristiknya.¹⁰

Total jumlah siswa di SMA LB N Cilacap pada tahun 2019 adalah sebanyak 56 siswa yang terbagi menjadi tiga kelas dimana kelas sepuluh berjumlah 19 siswa, kelas sebelas berjumlah 21 siswa dan untuk kelas dua belas berjumlah 16 siswa. Dan untuk jumlah guru dan karyawan ada 60 orang.¹¹

Adapun jenis dari program pendidikan keterampilan vokasional (penggabungan teori dan praktik) adalah: 1). Keterampilan Kerumahtanggaan yang meliputi Keterampilan Tata Busana (pembuatan lenan rumah tangga), Keterampilan Tata Boga (pembuatan olahan jahe rimpang, pembuatan olahan biji

¹⁰Sumber Data Diambil Dari Dokumen Arsip SMA LB N Cilacap Pada 07 Maret 2019.

¹¹Sumber Data Diambil Dari Dokumen Arsip SMA LB N Cilacap Pada 07 Maret 2019.

dan umbi, pembuatan olahan buah) dan Keterampilan Tata Kecantikan. 2). Keterampilan Otomotif/Perbengkelan, khususnya dalam hal perawatan mesin atau kendaraan yaitu: keterampilan cuci motor/mobil, keterampilan tambal ban, keterampilan bengkel sepeda/sepeda motor. 3). Keterampilan Rekayasa yang meliputi: keterampilan pertukangan kayu, keterampilan pertukangan besi/las, dan keterampilan kerajinan. Tujuan dari pendidikan vikasi itu sendiri adalah untuk melatih siswa dalam mencapai tingkat kemandiriannya¹²

Dari penjelasan tersebut didapatkan informasi terdapat sekian banyak jenis program unggulan yang diadakan di SMA LB N Cilacap yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai tenaga pendidik dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap siswa-siswi sekolah yang nantinya diharapkan ada alumni sekolah yang akan dapat mencari nafkah atau melakukan kegiatan bisnis sendiri yang sesuai dengan karakteristik ataupun bakat yang dilatih disekolah.

Peran guru dalam mendidik siswa di SMA LB N Cilacap adalah untuk mengajarkan siswa setiap program-program yang sudah terencana oleh sekolah. Sebenarnya tidak hanya mengajarkan melainkan juga mendampingi siswa dalam setiap kegiatan. Namun dalam hal ini terkadang guru tidak bisa melakukan atau mendampingi siswa dengan penuh atau bisa dikatakan guru hanya bisa mendampingi saat anak masih menjadi siswa lain dengan alumni yang setelah lulus sekolah alumni tidak ada pendampingan dari sekolah maupun dari guru.

Upaya sekolah dalam mendidik siswa dalam mencapai kemandirian adalah dengan melakukan beberapa hal diantaranya dengan meminimalkan

¹²Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Guru SMA LB N Cilacap Yang Diambil Pada Tanggal 07 Maret 2019.

bantuan, memberikan teladan, dan dengan memberikan apresiasi pada siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa membangun kemandirian anak sangatlah penting dan dapat dimulai sejak dini atau sedini mungkin dan dapat dilakukan dari hal kecil maupun hal yang sering dianggap sepele.

SMA LB N saat ini sudah mempunyai lulusan yang bekerja tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena kendala peran sekolah baik itu kepala sekolah guru kebijakan yang tidak melakukan pendampingan secara penuh. Yang pada akhirnya membuat lulusan atau alumni dari SMA LB N Cilacap bekerja tidak sesuai dengan bidang atau keterampilan yang telah diajarkan di sekolah. Kebanyakan dari alumni bekerja sebagai penjaga warung, penjaga konter, dan bahkan ada juga yang masih menganggur.

Alasan mengapa bisa terjadi hal seperti tersebut diatas adalah karena ada kendala yang dialami oleh pihak sekolah, khususnya guru pendidik yang dimana terkadang guru tidak bisa melakukan atau mendampingi siswa secara full atau bisa dikatakan guru hanya bisa mendampingi saat anak masih menjadi siswa lain dengan alumni yang setelah lulus sekolah alumni tidak ada pendampingan dari sekolah maupun dari guru.

Hal ini menimbulkan mutu atau kualitas lulusan sekolah kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari hal itu maka diperlukan adanya upaya baik dari Kepala Sekolah maupun Guru untuk bisa mendampingi siswa maupun alumni yang sudah lulus untuk bisa membantu agar bisa tercapai dan terlaksana program-program andalan sekolah.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Guru SMA LB N Cilacap dalam membangun kemandirian lulusan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Guru SMA LB N Cilacap dalam membangun kemandirian lulusan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan tentang apa itu disabilitas
 - b. Menambah wawasan tentang pentingnya peran sekolah dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan peran sekolah untuk penyandang disabilitas.
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun kemandirian penyandang disabilitas.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Inaya Lutfiah yang berjudul *Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra)* Jakarta. Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. Di dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya yang dilakukan oleh tunanetra klien Mitra Netra dalam mengembangkan agensi agar mendapatkan pekerjaan adalah dengan cara mengikuti program pelatihan ketenagakerjaan yang disediakan oleh Mitra Netra. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam program ketenagakerjaan, menjadikan mereka layak bersaing di dunia kerja dengan memiliki keahlian baik *hardskill* maupun *softskill*. Mitra Netra juga melakukan perannya dalam membantu mengimplementasikan regulasi pemerintah mengenai lapangan pekerjaan bagi tunanetra, melalui pengurus Mitra Netra dalam bentuk pencarian biaya untuk dana operasional pelatihan bagi klien, karena Mitra Netra merupakan organisasi non-profit yang tidak memiliki sumber dana pasti.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama meneliti tentang peran suatu instansi dalam mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian yang akan ditulis mencantumkan faktor pendukung peran guru pendidik dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mira Dwi Riyani yang berjudul *Peran Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (PBRTPD) Pundong Bantul Dalam Pembentukan Perilaku Sosial Difabel Grahita*. UIN Sunan Kalijaga 2016. Di dalam penelitian tersebut membahas tentang peran balai rehabilitasi

¹³Inaya Lutfiani, Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra) Jakarta. *Skripsi* (Jakarta: Jurusan Sosiologi Fisip Uinsyarifhidayatullahjakarta2017).Hlm.V.Diambildari<http://C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/Inaya%20lutfiyani-Fisip.Pdf>. Diakses Pada 05 Agustus 2019. Pukul 23:45.

terpadu penyandang disabilitas (BRTPD) dalam proses pembentukan perilaku sosial difabel grahita yaitu dengan memberikan bimbingan keterampilan ADL (*Activity of Daily Living*),serta bimbingan sosial kemasyarakatan yang mengajarkan cara bersosialisasi ditengah masyarakat. Selain pemberian program pendidikan tersebut beberapa metode yang gunkan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) dalam pembentukan perilaku sosial yaitu metode pembiasaan (*conditioning*), metode pengertian (*insight*), dan metode teladan (*modeling*). Metode yang paling sering digunakan dan efektif yaitu metode pembiasaan (*conditioning*).¹⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama meneliti tentang peran suatu instansi dalam mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian yang akan ditulis menyajikan data jumlah disabilitas pada instansi yang diteliti. Dan juga mengkaji factor pendukung peran guru pendidik dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas.

Ketiga, skripsi yang diteliti oleh Oca Pawalin yang berjudul *Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Universitas Lampung Bandar Lampung 2017. Di dalam penelitian tersebut membahas tentang peran dinas sosial kota metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, peran

¹⁴Mira Dwi Riyani, Peran Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (Pbrtpd) Pundong Bantul Dalam Pembentukan Perilaku Sosial Difabel Grahita. *Skripsi*. (Yogyakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Sunan Kalijaga 2016). Hlm. X. Diambil Dari File:///C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/12250056_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf. Diakses Pada 06 Agustus 00:15.

representative dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga Perlu Dilakukan Evaluasi Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama meneliti tentang peran suatu instansi dalam mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis adalah dimana pada penelitian yang akan ditulis lebih mengarah pada peran guru (orangnya) sedang pada penelitian diatas lebih pada peran instansi.

Keempat, skripsi yang diteliti oleh Utami Rahajeng yang berjudul *Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel*. Universitas Negeri Yogyakarta 2013. Di dalam penelitian tersebut membahas tentang Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel yang paling mendominasi adalah peran sebagai fasilitator, karena program-program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan lebih banyak mengarah dalam penyedia dan pemberi fasilitas. Namun, muncul juga peran-peran yang lain, yaitu: (1) pelayan masyarakat, (2) pendamping, (3) mitra, dan (4) penyandang dana. Pemenuhan hak pendidikan oleh Dinas Pendidikan untuk kaum difabel dilakukan dengan penyelenggaraan

¹⁵ Oca Pawalin, Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Skripsi*. (Lampung: Program Studi Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung 2017). Hlm. Ii. Diambil Dari File:///C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/Skripsi%2520tanpa%2520bab%2520pembahasan.Pdf. Diakses Pada 06 Agustus 2019. Pukul 00:30.

pendidikan inklusi melalui Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut Dinas Pendidikan juga membantu Forum SPPI, Forum GPK, dan *Resource Center*.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama meneliti tentang peran suatu instansi dalam mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis adalah dimana penelitian yang akan ditulis membahas tentang peran sekolah dalam penyelesaian masalah penyandang disabilitas.

F. Kajian Teoritik

Teori yang mendasari adanya peran sekolah terhadap pembangunan kemandirian penyandang disabilitas adalah teori peran. Teori peran itu sendiri adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah peran dibagi dalam tiga pengertian yaitu:

¹⁶Utami Rahajeng. *Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel. Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). Hlm. Vii. Diambil Dari File:///C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/Cover.Pdf Diakses Pada 11 Agustus 2019. Jam 13:21 Wib.

1. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁷

Peran menurut Soeharto dan Soekamto yang diikuti oleh Santosa menyatakan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁸

Mengenai peran Horoeputri, Arimbi dan Santosa juga mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri, dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting.¹⁹

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸Achmad Santosa Arimbi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), Hlm 237.

¹⁹Achmad Santosa Arimbi, *Peran Serta Masyarakat*, Hlm 257.

Sedangkan menurut Andrew yang dikutip oleh Partini menyatakan bahwa peran itu sendiri biasanya berkaitan dengan status, sedangkan status adalah “a social ranking within a group assign on the basis of position in the group or individual characteristic” maksud dari kutipan tersebut adalah tingkatan sosial individu dalam suatu kelompok yang ditugaskan berdasarkan posisi dalam kelompok atau karakter individu. Sedangkan peranan adalah “the expected perceived-enacted behavior patterns attributed to a particular job or position” maksud dari kutipan tersebut adalah pola perilaku yang diharapkan yang sebelumnya berkaitan dengan pekerjaan atau posisi tertentu.

Secara sosiologis, peran sulit dibedakan secara tegas dengan status. Keduanya merupakan kesatuan. Peran dan status hanya dapat dipisahkan secara teoritis, tetapi sangat sulit dibedakan dalam kenyataannya. Menurut Horton dan Hunt yang dikutip oleh Partini dengan jelas menunjukkan hal itu “status and role are two of same phenomenon. Status is a set of privileges and duties, a role is the acting out of this set” maksudnya status dan peran adalah dua fenomena yang sama. Dimana status adalah suatu keistimewaan dan tugas sedangkan peran adalah suatu tindakan.

Sedangkan menurut Soedjito yang dikutip oleh Partini menunjukkan bahwa peran memiliki fungsi untuk menjalankan hak dan kewajiban, tetapi status lebih merupakan himpunan dari hak dan kewajiban.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu kerangka penelitian yang memberikan petunjuk untuk mengetahui hal yang akan dibahas didalam

²⁰Partini, *Bias Gender Dalam Birokrasi*, (Yogyakarta: Tira Wacana, 2013), hlm.20.

penelitian, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi lima bab.

Bab Pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Berisikan landasan teori, meliputi tentang perumusan peran Guru SMA LB N Cilacap dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas, pengertian peran, pengertian membangun kemandirian, pengertian disabilitas, tujuan dalam mengatasi masalah penyandang disabilitas, serta peningkatan peran Guru SMA LB N Cilacap dalam membangun kemandirian permasalahan penyandang disabilitas.

Bab Ketiga, Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat, Hasil penelitian, berupa 1) Gambaran umum lokasi penelitian, 2) Penyajian data, 3) Analisis data, dan 4) Pembahasan tentang peran Guru SMA LB N Cilacap dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas.

Bab Kelima, Kesimpulan, berupa kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Kemudian pada bab akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peran guru dalam membangun kemandirian lulusan di SMA LB N Cilacap dilakukan dengan pemberian motivasi, pemberian tugas individu, serta pemberian tanggung jawab pada siswa. Dalam prosesnya guru melakukan kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari untuk dapat mencapai tujuan belajar mengajar yang diharapkan untuk dapat menjadikan lulusan yang lebih mandiri.

Selain penjelasan guru juga memiliki peranan lain yang sangat banyak sekali yaitu: 1. Guru sebagai ahli intruksional. 2. Guru sebagai motivator. Selain kedua peran tersebut Sanjaya juga membagi peran guru menjadi tujuh yaitu: 1. Guru sebagai sumber belajar. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Guru sebagai pengelola. 4. Guru sebagai demonstrator. 5. Guru sebagai pembimbing. 6. Guru sebagai motivator dan yang terakhir adalah 7. Guru sebagai elevator.

B. Saran

1. Bagi kepala sekolah

Saran untuk kepala sekolah adalah harus lebih melihat potensi peserta didik dan lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Bagi guru pendidik

Saran untuk guru pendidik adalah harus lebih telaten dan sabar dalam memberikan pelajaran ataupun memberikan tanggung jawab untuk siswa dengan melihat kondisi pada siswa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usma Rianse. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Amirrudin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pramana Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimbi Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Ariyulinda, Nita. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, *Jurnal Hukum Negara*. Volume: 5 , No.1. Perancang Muda Bagian Kesra Deputi Perundang-Undangan Setjen DPRRI Masyur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press,
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kamus besar Bahasa Indonesia.
- Lestari, Eta Yuni, dkk. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Integralistik No.1/Th. Xxviii/2017, Januari-Juni 2017*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lutfiani Inayah. 2017. *Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra)* Jakarta. *Skripsi*. Hlm. V. Jakarta: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dari [Http:///C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/Inaya%20lutfiyani-Fisip.Pdf](http://C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/Inaya%20lutfiyani-Fisip.Pdf). Diakses Pada 05 Agustus 2019.

- Masrun, dkk. 1986. Studi Mengenai Kemandirian Pada Penduduk Di Tiga Suku (Jawa, Batak, Bugis). Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Meleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 18.
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notosoedirdjo, Moeljono & Latipun. 2001. *Kesehatan Mental Konsep & Penerapan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurjalal, Analisis UU.2018. No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham. *Jurnal Pahlawan Volume 1 No 1 ISSN : 2615-5583 (Online)*. Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Partini, 2013. *Bias Gender dalam Birokrasi*, Yogyakarta: Tira Wacana.
- Partini. 2013. *Bias Gender Dalam Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pawalin Oca. 2017. Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Lampung. *Skripsi*. Hlm. II. Lampung: Program Studi Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. Diambil Dari <File:///C:/Users/ASUS%20X454Y/Downloads/SKRIPSI%2520TANPA%2520OBAB%2520PEMBAHASAN.Pdf>. Diakses Pada 06 Agustus 2019. Pukul 00:30.WIB.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Tentang Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas Tubuh. Diambil dari <http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22876/2/reference.pdf>. Diakses tanggal 20 juni 2019. Jam 13.03 WIB.
- Purwanto, Ngalm. 2002. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahajeng Utami. 2013. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel. *Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Diambil Dari <File:///C:/Users/Asus%20x454y/Downloads/Cover.Pdf> Diakses Pada 11 Agustus 2019. Jam 13:21 WIB.

- Rahmayani, Siti Annisa. 2018. *Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh. Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Uin Yogyakarta. Hlm.1 Diambil Dari [Http//Dspace.Uii.Ac.Id,Pdf](http://Dspace.Uii.Ac.Id,Pdf), Diakses Pada Tanggal 08 Juli 2019. Pukul 21.04 WIB.
- Riyani. Mira Dwi. 2016. *Peran Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (PBRTPD) Pundong Bantul Dalam Pembentukan Perilaku Sosial Difabel Grahita. Yogyakarta. Skripsi*. Hlm. X. Yogyakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Diambil Dari File:///C:/Users/ASUS%20X454Y/Downloads/12250056_BAB-I_IV-Atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.Pdf. Diakses Pada 06 Agustus 00:15 WIB.
- Rumidi, Sukandar. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sarwono Sarlito Wirawan. 2004. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada
- Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK,SD,SMP,SMA & SLB, 2007. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)
- Wina, Sanjaya. 2016. *Strategi Pembelajaran : Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta. Kencana.
- Yamin, Martinis. 2013. *Professionalisasi Guru & Implementasi KTSP*, Jakarta: GP Press Group.